



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
PENGAWASAN DAMPAK DIGITALISASI INDUSTRI ONLINE TERHADAP  
PEKERJA PADA PERUSAHAAN RITEL  
KE PROVINSI BALI MASA SIDANG IV  
TAHUN 2018 - 2019**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, diamanatkan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja spesifik ini difokuskan pada bidang Ketenagakerjaan sebagai salah satu tugas pengawasan Komisi IX DPR RI di bidang pembangunan. Kunjungan ini akan mendalami berbagai masalah yang terkait dengan dampak digitalisasi industri online terhadap pekerja pada perusahaan ritel, dari beberapa sumber menyatakan, 71 juta pekerjaan akan hilang karena era digital dan hanya 2.1 juta pekerjaan baru yang tumbuh yaitu bidang matematika, teknik dan komputer. Saat ini beberapa industri yang terpuruk karena era digitalisasi atau bisnis online yaitu **Supermarket**, industri online akan menjadi saingan berat untuk *brand-brand* supermarket ternama seperti Carrefour, Hypermart, dan lain-lain, **Elektronik**, Handphone, **Transportasi**, **Hotel dan Koran**.

Saat ini dampak digitalisasi ini telah menimbulkan masalah dirumahnya dan PHK ratusan pekerja yang sebelumnya bekerja secara langsung maupun tidak langsung pada PT. Arta Sedana Retalindo.

Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Komisi IX DPR RI melalui kunjungan kerja spesifik ini diharapkan mendapatkan berbagai informasi dan masukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap dampak digitalisasi industri online terhadap pekerja pada perusahaan ritel ke Provinsi Bali untuk perlindungan pekerja dimasa yang akan datang.

## **B. LANDASAN**

1. Pasal 228 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD RI
2. Pasal 59 Peraturan Tata Tertib DPR RI
3. Kesimpulan Internal Rapat Tanggal 5 Maret 2019

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang dampak digitalisasi industri online terhadap pekerja pada perusahaan ritel
2. Melakukan analisa tentang kebijakan yang telah ditempuh dan telah diimplementasikan dalam perlindungan pekerja terhadap dampak digitalisasi industri online terhadap pekerja pada perusahaan ritel
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan pekerja terhadap dampak digitalisasi industri online terhadap pekerja pada perusahaan ritel
4. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenakerjaan, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta semua pihak terkait dengan perlindungan pekerja terhadap dampak digitalisasi industri online terhadap pekerja pada perusahaan ritel

## **D. KELUARAN (OUTPUT)**

Hasil Kunjungan Kerja ini salah satunya adalah rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah sehingga di masa yang akan datang dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan

terhadap dampak digitalisasi industri online terhadap pekerja pada perusahaan ritel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pertemuan Komisi IX DPR RI di kantor Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Kependudukan dengan:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja; Transmigrasi dan Kependudukan Pemprov. Bali
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
3. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua
4. Direksi PT. Arta Sedana Retailindo
5. Serikat Pekerja PT. Arta Sedana Retailindo
6. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Asprindo) Prov. Bali

Didampingi Mitra Komisi IX dari

1. Dirjen Binapenta dan PPK Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Dirjen Binwas dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI
4. Direksi BPJS Ketenagakerjaan
5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

## F. WAKTU PELAKSANAAN

Tanggal 12 – 14 Maret 2019

## II. SUSUNAN ANGGOTA

<b>NO. ANGG</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN/ FRAKSI</b>	<b>DAPIL</b>
536	Dra. ERMALENA, MHS	KETUA/PAN	NTB
380	DR. PIUS LUSTRILANANG, S.IP.,M.Si	WAKIL KETUA TIM/GERINDRA	NTT I
155	dr. RIBKA TJIPTANING	ANGGOTA/PDI-P	JABAR IV
300	IMANUEL EKADIANUS BLEGUR	ANGGOTA/GOLKAR	NTT II
301	Drs. JULIANUS POTE LEBA.,M.Si	ANGGOTA/GOLKAR	NTT II
	SYAMSUL BACHRI	ANGGOTA/GOLKAR	SULSEL II
355	DR. SUMARJATI ARJOSO	ANGGOTA/GERINDRA	JATENG III
357	BAMBANG RIYANTO, SH.,MH	ANGGOTA/GERINDRA	JATENG V
428	Dra. LUCY KURNIASARI	ANGGOTA/DEMOKRAT	JATIM I
477	H. HAERUDIN, S.Ag	ANGGOTA/PAN	JABAR XI
483	MUHAMMAD HANAFI, S.Sos	ANGGOTA/PAN	JATNG VIII
40	HANDAYANI, SKM	ANGGOTA/PKB	JAMBI

42	ARYANTO MUNAWAR	ANGGOTA/PKB	LAMPUNG I
95	AHMAD ZAINUDIN, Lc	ANGGOTA/PKS	DKI I
534	KARTIKA YUDISTI, b.Eng.,M.Sc	ANGGOTA/PPP	BANTEN II

### III. GAMBARAN UMUM INDUSTRI ONLINE

#### A. Umum

Dampak digitalisasi industri online terhadap pekerja pada perusahaan ritel, dari beberapa sumber menyatakan, 71 juta pekerjaan akan hilang karena era digital dan hanya 2.1 juta pekerjaan baru yang tumbuh yaitu bidang matematika, teknik dan komputer. Saat ini beberapa industri yang terpuruk karena era digitalisasi atau bisnis online yaitu **Supermarket**, industri online akan menjadi saingan berat untuk *brand-brand* supermarket ternama seperti Carrefour, Hypermart, dan lain-lain, **Elektronik**, Handphone, **Transportasi**, **Hotel dan Koran**.

#### B. PT. Artha Sedana Retalindo

Permasalahan yang dihadapi PT. Arta Sedana Retalindo (ex Hardys) saat ini terjadi akibat Penutupan secara serentak toko-toko geray supermarket, menyebabkan permasalahan ketenagakerjaan, tidak hanya nilai, namun juga kepastian akan hak-hak yang harus diterima oleh tenaga kerja. Disinyalir ada ratusan tenaga kerja langsung dan 50 persen tenaga kerja tidak langsung yang dirumahkan dan mengalami PHK.

Permasalahan ini ditengarai akibat digitalisasi industri online, sering dituding sebagai penyebab utama penutupan perusahaan ritel namun tidak bisa secara serta merta karena secara nasional omzet industri online tidak lebih dari 1,6 persen dari total omzet ritel nasional.

### IV. HASIL-HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK DAMPAK INDUSTRI ONLINE

#### A. Kegiatan Pertemuan

Pertemuan Komisi IX DPR RI di kantor Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Kependudukan dengan:

7. Terkait dg permasalahan perumahan dan PHK PT. Arta Sedana Retalindo sebelumnya muncul dr pengalihan saham yaitu PT. Hardys Retalindo ke PT. Arta Sedana Retalindo akibat pailit. Selanjutnya asetnya berupa gerai-gerai toko di beberapa daerah di tutup yg mengakibatkan perumahan dan PHK Karyawan. Sejak pertengahan tahun lalu, perusahaan secara perlahan membuka kembali toko-toko dan merekrut kembali pekerjanya.
8. Terkait permasalahan Dampak Digitalisasi industri online di PT. Arta Sedana Retalindo, memberikan klarifikasi bahwa pengaruh digitalisasi tdk terlalu significant, terutama pada sektor usaha yg lain namun pada departmen store berdampak 20 - 30 persen.
9. Pemerintah Provinsi Bali, saat ini telah melakukan sosialisasi digitalisasi online ke desa-desa di Provinsi Bali dengan menyediakan spot-spot internet berjumlah dari 1.600 menjadi 4.000 akses poin hingga 2020 yang akan datang
10. Terkait dengan perubahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yg digantikan dengan sistem online, sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dihilangkan atau di gantikan kepesertaannya
11. Terkait dengan pekerja PT. Hardys yg hingga saat ini belum diselesaikan hak-hak normatif dan jaminan sosialnya, BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan belum secara keseluruhan terselesaikan.

## **V. KESIMPULAN**

1. Pemerintah Provinsi Bali, saat ini telah melakukan upaya melalui pertemuan dg pihak Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), BPJS Ketenagakerjaan dan Perusahaan serta sosialisasi digitalisasi online ke desa-desa di Provinsi Bali dengan menyediakan spot-spot internet berjumlah dari 1.600 menjadi 4.000 akses poin hingga 2020 yang akan datang.
2. Dampak digitalisasi online dipengaruhi sektor pariwisata, namun pertumbuhan ritel saat ini di Bali rendah. Seiring membaiknya sektor pariwisata kondisi didigitalisasi industri online bagi pekerja lebih baik pula, meskipun belum seperti tahun-tahun sebelumnya.
3. Permasalahan pekerja yg mengalami PHK, diharapkan dinas ketenagakerjaan dan PT. Arta Sedana Retalindo segera menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku

## **PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Dampak Diditalisasi Industri Online terhadap Pekerja pada Perusahaan Ritel Komisi IX DPR RI Masa Sidang IV Tahun 2018 – 2019.

Jakarta, 5 Maret 2019

**KETUA TIM**

Ttd

Dra. ERMALENA, MHS  
A-536